



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 23 April 2021

Halaman: 5

LINTAS MENTAOK

DPRD Jogja Bahas Raperda Toko Rakyat

UMBULHARJO-DPRD Kota Jogja membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Toko Rakyat sebagai pengganti Raperda Penataan Toko Swalayan. Raperda ini merupakan upaya dalam melindungi toko yang dikelola langsung oleh warga.

"Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil konsultasi ke Pemda DIY, bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan pengaturan toko modern atau swalayan," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan, Kamis (22/4).

Berdasarkan rekomendasi tersebut, DPRD Kota Jogja akan segera membuat naskah akademik baru untuk Raperda Toko Rakyat. Nantinya pengaturan ini akan fokus pada pembinaan, perlindungan, hingga pemberdayaannya. "Agar toko yang dikelola masyarakat ini bisa bertahan di tengah merebaknya toko modern atau toko waralaba," katanya.

Oleg menjelaskan, pembahasan mengenai Raperda Toko rakyat tetap akan diupayakan dapat dibahas tahun ini. Nantinya upaya pembinaan terhadap toko rakyat di antaranya meliputi pelatihan terkait manajemen usaha. (yop)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005